

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIAGRAM	iv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian-Pengertian	
1. Peranan	13
2. Pemerintah Republik Indonesia	
3. Mencegah Dan Memberantas	14
B. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	14
1. Pengertian dan Jenis Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	14
2. Tugas dan Fungsi	17
3. Perwakilan Pada Negara Yang Belum Diakui Secara <i>De Jure</i> (Taiwan).	19
4. Perlindungan Hukum Oleh Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri.	21
C. Perdagangan Orang.	22
1. Pengertian Perdagangan Orang (Perempuan Dan anak).	22
2. Pelaku Korban, dan Pengguna Perdagangan Perempuan Dan Anak.	25
3. Tujuan Perdagangan Perempuan Dan Anak.	28
4. Penyebab perdagangan Perempuan (melalui <i>mail order</i> <i>bride</i>).	28
5. Cara Kerja Pelaku Perdagangan Orang	30
D. Perjanjian Internasional Sebagai Pelaksanaan Hubungan Antar Negara.	31
1. Istilah-Istilah Perjanjian Internasional.	31
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Internasional.	33
3. Cara Melakukan Perjanjian Internasional.	34

III. METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.	35
B. Tipe Penelitian.	35
C. Pendekatan Masalah.	36
D. Data dan Sumber Data.	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.	38
G. Analisis Data.....	39
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum.....	40
1. Perdagangan Orang Di Indonesia	40
2. Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang.....	47
B. Perdagangan Orang Dengan Motif <i>Mail Order Bride</i> /Pengantin Pesanan Dari Singkawang Ke Taiwan.....	51
C. Perlindungan Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap WNI/Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nasional Dikaitkan Dengan Konvensi-Konvensi Internasional Mengenai Perdagangan Orang	55
D. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang (Pengantin Pesanan di Singkawang)	63
E. Perlindungan WNI Korban Pengantin Pesanan Di Taiwan	70
1. Gambaran Umum Daerah Taiwan dan Kantor Dagang & Ekonomi Indonesia Di Taiwan	70
2. Upaya Perlindungan Hukum Korban Pengantin Pesanan Oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Kamar Dagang & Ekonomi Indonesia (KDEI) Di Taiwan.....	74
F. Hambatan Dalam Proses Pencegahan dan Pemberantasan TPPO Dengan Motif Pengantin Pesanan.....	80
V. KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN